

**PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Oleh:

Inas Sofia Latif¹, Niken Subekti Budi Utami²

INTISARI

Kesejahteraan tenaga kerja merupakan hal yang perlu mendapatkan perlindungan, karena meskipun sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terkadang pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan atau yang semestinya. Jaminan kesehatan nasional merupakan salah satu program pemerintah yang termasuk kedalam perwujudan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga pelaksanaannya perlu untuk dilakukan sedemikian rupa. Agar tercapai suatu pelaksanaan yang baik, diperlukan peran dari pihak ketiga untuk terlibat. Pihak ketiga disini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari pelaksana pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Praktik kerja lapangan dimaksudkan untuk melatih keterampilan teknis mahasiswa dalam bentuk pengalaman nyata yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan. Diharapkan, mahasiswa dapat menjadi pribadi yang layak untuk diterjunkan dalam dunia kerja yang memang membutuhkan kualifikasi yang mapan. Tujuan lainnya adalah sebagai jembatan penghubung antara teori profesi yang diberikan selama kuliah dengan praktik profesi dalam dunia kerja nyata secara khusus.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan bertindak untuk mengawasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional khususnya bagi tenaga kerja di sektor swasta (perusahaan). Pengawasan ini merupakan wujud dari sistem *check and balance* yang perlu diterapkan agar tercipta suatu keseimbangan. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara, tenaga kerja sebagai pengguna, dan Dinas Tenaga Kerja sebagai pengawas.

Kata Kunci: pengawasan, jaminan kesehatan nasional, tenaga kerja.

¹ Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi UGM

² Dosen Fakultas Hukum UGM

**ROLE OF THE DEPARTMENT OF LABOR AND TRANSMIGRATION
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
IN MONITORING IMPLEMENTATION OF
THE NATIONAL HEALTH SECURITY PROGRAM**

By:

Inas Sofia Latif, Niken Subekti Budi Utami

ABSTRACT

The welfare of the labor is the thing to get protection, because eventhough it is set in some legislations, its implementation is sometimes not as expected or that shoud be. National health security/national healthcare is one of the government programs that are included into the embodiment of the welfare of the labor, so that its implementation will need to be done in such a way. In order to reach a good implementation, the role of third party needed to get involved. The third party is Departement of Labor and Transmigration of Daerah Istimewa Yogyakarta as part of implementing the government in the field of labor and transmigration.

The practice of field work are meant to train college students technical skills in the form of real experience at places that have been determined. The puspose is, college students can become eligible for the plunge in the world of work which does require an established qualification. The other purpose is as a bridge which connecting between the theory profession given during lectures with the practice of the profession in the world of real work.

In accordance with the tasks and functions, the Department of Labor and Transmigration of Daerah Istimewa Yogyakarta by Division of Labor Supervision act to control oversees the organization of national healthcare, especially for the labor in the private sector (companies). This supervision is a form of checks and balances system that need to be applied so that nurtures the balance. BPJS Health as the organizer, labor as the user, and the Labor Department as a supervisor.

Keywords: monitoring, national healthcare, labor.